



Muawiyah Ibnu Abi Sufyan dan Pembentukan Dinasti Bani Umayyah, Kemajuan dan Kemunduran Dinasti Bani Umayyah

***¹Sahbi Diti, ²Ansar Tohe**

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Ternate, Indonesia

email: *¹sahbyditi@gmail.com, ²ansartohe7@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the background of the establishment of the Umayyad Dynasty by Muawiyah ibn Abi Sufyan, examine the transformation of the Islamic political system, identify the administrative and civilizational achievements of the dynasty, and explain the factors that led to its decline. The research employed a qualitative method using a historical approach through library research. Data were collected from classical historical sources, academic books, and relevant scientific journals, and were analyzed using historical analysis, including heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The findings indicate that the establishment of the Umayyad Dynasty marked a significant transformation in the Islamic political system from a consultative (*shura*) model to a hereditary monarchy. Under Muawiyah's leadership, the dynasty succeeded in strengthening state administration, developing bureaucratic institutions, expanding its territory, and promoting economic, cultural, and architectural advancement. However, internal political conflicts, social inequality, tribal rivalries, discrimination against *mawali*, and the emergence of opposition movements, particularly the Abbasids, gradually weakened the dynasty and led to its collapse in 750 CE. The study concludes that the sustainability of a government depends not only on political and military power but also on effective governance, social justice, and inclusive leadership.

Keywords: *Muawiyah Ibn Abi Sufyan, Umayyad Dynasty, Islamic Political History, Islamic Civilization, Historical Research*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang berdirinya Dinasti Bani Umayyah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, menjelaskan transformasi sistem politik Islam, mengkaji perkembangan pemerintahan dan peradaban Islam pada masa Dinasti Umayyah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kemundurannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai sumber sejarah klasik, buku ilmiah, dan jurnal yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdirinya Dinasti Bani Umayyah menjadi titik awal perubahan sistem pemerintahan Islam dari model musyawarah (*syura*) menuju sistem monarki turun-temurun. Di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan, pemerintahan berhasil melakukan reformasi administrasi, memperkuat birokrasi, memperluas wilayah kekuasaan, serta mendorong kemajuan dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan arsitektur. Meskipun demikian, konflik internal, ketimpangan sosial, persaingan antarsuku, diskriminasi terhadap kaum *mawali*, serta munculnya gerakan oposisi dari Bani Abbasiyah menjadi faktor utama yang menyebabkan runtuhnya Dinasti Bani Umayyah pada tahun 750 M. Penelitian ini menegaskan bahwa keberlangsungan suatu



pemerintahan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola, keadilan sosial, dan kemampuan pemimpin dalam menjaga stabilitas politik serta persatuan masyarakat.

Kata Kunci: *Muawiyah Bin Abi Sufyan, Dinasti Bani Umayyah, Sejarah Politik Islam, Peradaban Islam, Penelitian Historis*

PENDAHULUAN

Sejarah peradaban Islam memperlihatkan bahwa perkembangan sistem politik umat Islam mengalami perubahan yang sangat signifikan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Masa Khulafaur Rasyidin menjadi periode awal yang menampilkan model kepemimpinan berdasarkan prinsip musyawarah, keadilan, dan legitimasi umat. Akan tetapi, dinamika politik yang berkembang setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan memunculkan konflik internal yang dikenal sebagai *fitnah kubra*, yaitu perpecahan besar pertama dalam sejarah Islam. Konflik tersebut tidak hanya berdampak pada stabilitas pemerintahan, tetapi juga mengubah arah perkembangan politik Islam pada masa-masa berikutnya. Peristiwa Perang Shiffin, tahkim, munculnya kelompok Khawarij, hingga wafatnya Ali bin Abi Thalib menjadi rangkaian peristiwa yang membuka jalan bagi lahirnya sistem pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan (Hitti, 2006; Lapidus, 2014).

Berdirinya Dinasti Bani Umayyah pada tahun 661 M merupakan titik balik penting dalam sejarah politik Islam karena menandai transformasi sistem pemerintahan dari pola pemilihan khalifah melalui musyawarah menjadi sistem monarki hereditas (dinasti). Muawiyah bin Abi Sufyan berhasil membangun stabilitas politik setelah masa konflik yang berkepanjangan, sekaligus melakukan pembenahan administrasi pemerintahan melalui penguatan lembaga *diwan*, sistem pos (*barid*), birokrasi negara, serta organisasi militer yang lebih terstruktur. Reformasi tersebut menjadi fondasi penting bagi berkembangnya pemerintahan Islam menjadi sebuah imperium yang memiliki wilayah kekuasaan sangat luas, mulai dari Afrika Utara hingga Asia Tengah (Kennedy, 2016; Hodgson, 1974). Perubahan ini menunjukkan bahwa Dinasti Umayyah memiliki peran strategis dalam membentuk sistem pemerintahan Islam yang lebih kompleks dibandingkan periode sebelumnya.



Selain keberhasilan dalam bidang politik dan administrasi, Dinasti Bani Umayyah juga memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi, budaya, dan peradaban Islam. Reformasi administrasi yang dilakukan oleh Khalifah Abd al-Malik bin Marwan, seperti arabisasi bahasa administrasi pemerintahan dan pencetakan mata uang Islam, memperkuat identitas politik serta ekonomi kekhalifahan. Di bidang arsitektur, pembangunan Kubah Batu (*Dome of the Rock*) di Yerusalem menjadi simbol kemajuan seni bangunan Islam, sementara perluasan wilayah hingga Andalusia membuka ruang bagi interaksi berbagai peradaban yang mempercepat pertumbuhan ilmu pengetahuan, perdagangan, dan kebudayaan (Hitti, 2006; Lapidus, 2014). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Dinasti Umayyah memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pembentukan fondasi peradaban Islam klasik.

Meskipun demikian, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari berbagai persoalan yang pada akhirnya menyebabkan kemunduran Dinasti Umayyah. Ketimpangan sosial antara bangsa Arab dan kaum *mawali* (non-Arab), konflik antarsuku Arab, serta munculnya berbagai gerakan oposisi dari kelompok Syiah dan Bani Abbasiyah menjadi faktor utama yang melemahkan stabilitas pemerintahan. Akumulasi berbagai konflik tersebut berujung pada Revolusi Abbasiyah tahun 750 M yang mengakhiri kekuasaan Dinasti Umayyah di Timur. Walaupun demikian, pengaruh politik dan budaya Dinasti Umayyah tetap berlanjut melalui berdirinya Kekhalifahan Umayyah di Andalusia oleh Abdurrahman ad-Dakhil, yang kemudian berkembang menjadi salah satu pusat peradaban Islam di Eropa (Kennedy, 2016; Hitti, 2006).

Berbagai penelitian terdahulu umumnya lebih banyak mengkaji Dinasti Umayyah dari perspektif sejarah politik, ekspansi wilayah, maupun pergantian sistem kekuasaan. Namun demikian, kajian yang mengintegrasikan peran Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pendiri dinasti dengan perkembangan administrasi pemerintahan, kemajuan peradaban, serta faktor-faktor kemunduran Dinasti Umayyah secara komprehensif masih relatif terbatas. Padahal, pemahaman yang utuh mengenai hubungan antara perubahan sistem



politik, kebijakan pemerintahan, dan dinamika sosial sangat diperlukan untuk menjelaskan proses transformasi pemerintahan Islam pada masa klasik. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi akademik untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai dinamika lahir, berkembang, hingga runtuhnya Dinasti Bani Umayyah berdasarkan berbagai sumber sejarah yang kredibel.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang berdirinya Dinasti Bani Umayyah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, menjelaskan perkembangan pemerintahan dan peradaban yang dicapai selama masa kekuasaannya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dan keruntuhan dinasti tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian sejarah peradaban Islam, khususnya mengenai transformasi sistem pemerintahan Islam dari masa Khulafaur Rasyidin menuju pemerintahan dinasti. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, maupun masyarakat yang ingin memahami dinamika politik dan peradaban Islam secara lebih mendalam, sekaligus menjadi bahan refleksi terhadap pentingnya tata kelola pemerintahan yang adil, inklusif, dan berorientasi pada persatuan umat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan historis (*historical research*) melalui studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian peristiwa sejarah yang berkaitan dengan berdirinya Dinasti Bani Umayyah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, perkembangan sistem pemerintahan, pencapaian dalam bidang politik dan peradaban, serta faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti tersebut. Penelitian dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika sejarah Dinasti Bani Umayyah. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2026. Seluruh kegiatan penelitian



dilakukan melalui studi kepustakaan di perpustakaan perguruan tinggi serta pemanfaatan berbagai sumber ilmiah yang diperoleh dari buku, jurnal nasional dan internasional, prosiding, artikel ilmiah, serta dokumen sejarah yang dapat diakses melalui basis data akademik dan perpustakaan digital.

Sasaran penelitian ini adalah berbagai informasi historis yang berkaitan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pendiri Dinasti Bani Umayyah, proses terbentuknya sistem pemerintahan dinasti, perkembangan politik dan administrasi pemerintahan, kemajuan peradaban Islam pada masa Umayyah, serta faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dan berakhirnya kekuasaan Dinasti Bani Umayyah. Penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel sebagaimana penelitian kuantitatif. Subjek penelitian berupa sumber-sumber kepustakaan yang relevan dengan tema penelitian. Sumber data dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi kitab-kitab sejarah Islam klasik, dokumen sejarah, serta karya-karya yang memuat informasi mengenai pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan dan Dinasti Bani Umayyah. Sementara itu, sumber sekunder terdiri atas buku referensi, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, ensiklopedia, dan publikasi akademik lainnya yang membahas sejarah politik dan peradaban Islam. Pemilihan sumber dilakukan dengan mempertimbangkan kredibilitas penulis, relevansi isi, serta otoritas penerbit agar data yang diperoleh memiliki tingkat keabsahan yang tinggi.

Penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi masalah penelitian berdasarkan fenomena sejarah yang berkaitan dengan lahir dan berkembangnya Dinasti Bani Umayyah. Tahap kedua berupa pengumpulan berbagai literatur yang relevan melalui perpustakaan maupun basis data ilmiah. Tahap ketiga adalah proses seleksi dan klasifikasi data sesuai dengan fokus penelitian, yaitu latar belakang berdirinya Dinasti Umayyah, perkembangan pemerintahan, kemajuan peradaban, serta faktor-faktor kemunduran dinasti. Tahap berikutnya adalah analisis data secara kritis dengan membandingkan berbagai pendapat dan fakta sejarah dari beberapa sumber.



Tahap terakhir berupa penyusunan hasil penelitian dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai objek penelitian. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang berperan dalam menentukan fokus penelitian, memilih sumber data, melakukan proses pengumpulan informasi, menganalisis data, menafsirkan temuan, dan menyusun kesimpulan penelitian. Untuk mendukung proses tersebut digunakan instrumen bantu berupa lembar dokumentasi, kartu data, serta format pencatatan referensi yang memudahkan proses pengelompokan dan analisis data.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber tertulis. Peneliti mengumpulkan data dari buku-buku sejarah Islam, jurnal ilmiah, artikel akademik, dokumen sejarah, serta sumber-sumber ilmiah lain yang berkaitan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan dan Dinasti Bani Umayyah. Selanjutnya dilakukan proses pencatatan, pengelompokan, dan pengorganisasian data berdasarkan tema-tema penelitian sehingga diperoleh informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode analisis historis. Data yang telah terkumpul terlebih dahulu direduksi melalui proses seleksi terhadap informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya data diklasifikasikan berdasarkan tema, kemudian dibandingkan antara satu sumber dengan sumber lainnya untuk memperoleh pemahaman yang objektif mengenai peristiwa sejarah yang dikaji. Tahap akhir dilakukan interpretasi terhadap fakta-fakta sejarah yang telah dianalisis sehingga diperoleh kesimpulan mengenai peran Muawiyah bin Abi Sufyan dalam pembentukan Dinasti Bani Umayyah, perkembangan pemerintahan dan peradaban Islam pada masa tersebut, serta faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai literatur, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Selain itu, peneliti melakukan telaah kritis terhadap isi, konteks penulisan, serta kesesuaian fakta sejarah yang dikemukakan oleh masing-masing sumber



sehingga hasil penelitian memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdirinya Dinasti Bani Umayyah sebagai Transformasi Sistem Politik Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdirinya Dinasti Bani Umayyah merupakan konsekuensi dari dinamika politik yang terjadi pada akhir masa Khulafaur Rasyidin. Konflik yang bermula dari terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan berkembang menjadi perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan mengenai penyelesaian kasus pembunuhan tersebut. Perang Shiffin (657 M) dan proses tahkim tidak mampu menyelesaikan konflik, bahkan memunculkan kelompok-kelompok politik baru seperti Khawarij yang semakin memperburuk stabilitas pemerintahan Islam. Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib dan pengunduran diri Hasan bin Ali melalui peristiwa '*Am al-Jama'ah*' pada tahun 661 M, Muawiyah diangkat sebagai khalifah dan mendirikan Dinasti Bani Umayyah dengan pusat pemerintahan di Damaskus.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa lahirnya Dinasti Umayyah bukan sekadar pergantian pemimpin, tetapi merupakan transformasi sistem politik Islam dari model kepemimpinan berbasis musyawarah (*syura*) menuju sistem monarki turun-temurun (*hereditary monarchy*). Perubahan tersebut muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan stabilitas politik setelah konflik berkepanjangan. Dengan demikian, sistem dinasti dapat dipahami sebagai strategi politik untuk menjaga kesinambungan pemerintahan di tengah kondisi sosial-politik yang tidak stabil.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan Kennedy (2016) dan Lapidus (2014) yang menjelaskan bahwa perubahan sistem pemerintahan pada masa Muawiyah merupakan bentuk adaptasi politik terhadap semakin luasnya wilayah Islam dan semakin kompleksnya persoalan administrasi negara. Namun demikian, perubahan tersebut juga memunculkan perdebatan mengenai legitimasi kekuasaan karena berbeda dengan tradisi pemilihan khalifah pada



masa Khulafaur Rasyidin. Oleh sebab itu, berdirinya Dinasti Umayyah dapat dipandang sebagai awal terbentuknya sistem pemerintahan Islam yang lebih terpusat, tetapi sekaligus menjadi titik awal munculnya berbagai konflik politik pada masa berikutnya.

Reformasi Pemerintahan Muawiyah sebagai Dasar Penguatan Kekhalifahan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan berhasil melakukan reformasi pemerintahan yang memberikan fondasi kuat bagi perkembangan kekhalifahan Islam. Reformasi tersebut meliputi pembentukan lembaga administrasi (*diwan*), pengembangan sistem pos (*barid*), penguatan birokrasi pemerintahan, serta pembentukan angkatan laut yang mampu menghadapi kekuatan Bizantium. Pemindahan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus juga memberikan keuntungan strategis karena wilayah Syam telah memiliki sistem administrasi yang lebih mapan.

Data tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Muawiyah tidak hanya terletak pada kemampuan politiknya dalam meredam konflik, tetapi juga pada kemampuannya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif. Sistem administrasi yang terorganisasi memungkinkan pengawasan terhadap wilayah yang sangat luas serta mempercepat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Temuan ini memperkuat pendapat Hitti (2006) bahwa Dinasti Umayyah merupakan fase penting dalam perkembangan birokrasi pemerintahan Islam. Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya yang masih sederhana, administrasi pada masa Umayyah mulai mengadopsi sistem birokrasi yang lebih profesional. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan politik yang dilakukan Muawiyah tidak hanya berdampak pada struktur kekuasaan, tetapi juga meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.



Kemajuan Dinasti Bani Umayyah dalam Bidang Politik, Ekonomi, dan Peradaban

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinasti Bani Umayyah berhasil mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang. Dalam bidang politik dan administrasi, reformasi yang dilakukan Abd al-Malik bin Marwan melalui arabisasi administrasi pemerintahan dan pencetakan mata uang Islam memperkuat identitas politik sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi negara. Kebijakan tersebut berhasil mengurangi ketergantungan terhadap sistem administrasi Bizantium dan Persia.

Di bidang ekspansi wilayah, kekuasaan Dinasti Umayyah berkembang sangat pesat hingga meliputi Andalusia di bagian barat, Afrika Utara, Asia Tengah, dan sebagian wilayah India di bagian timur. Luasnya wilayah tersebut mendorong berkembangnya jaringan perdagangan internasional serta mempertemukan berbagai budaya, bahasa, dan tradisi yang memperkaya peradaban Islam. Kemajuan ekonomi terlihat dari meningkatnya aktivitas perdagangan, sistem perpajakan yang lebih teratur, serta pembangunan berbagai infrastruktur pendukung pemerintahan.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan adanya perkembangan dalam bidang budaya dan arsitektur. Pembangunan Dome of the Rock di Yerusalem dan Masjid Agung Damaskus menjadi bukti bahwa Dinasti Umayyah tidak hanya berorientasi pada ekspansi wilayah, tetapi juga membangun identitas budaya Islam melalui karya-karya arsitektur monumental.

Temuan ini sejalan dengan Hodgson (1974) yang menyatakan bahwa masa Umayyah merupakan periode konsolidasi negara Islam menuju sebuah imperium yang memiliki sistem politik, ekonomi, dan budaya yang semakin matang. Dengan demikian, keberhasilan Dinasti Umayyah tidak hanya diukur dari luas wilayah kekuasaannya, tetapi juga dari kemampuannya membangun institusi pemerintahan dan memperkuat identitas peradaban Islam.



Faktor-Faktor Kemunduran Dinasti Bani Umayyah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemunduran Dinasti Bani Umayyah dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi konflik perebutan kekuasaan di lingkungan keluarga istana, persaingan antarsuku Arab, serta kebijakan diskriminatif terhadap kaum *mawali* yang menimbulkan ketidakpuasan sosial. Ketimpangan tersebut menyebabkan semakin banyak kelompok masyarakat yang kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahan Dinasti Umayyah.

Di sisi lain, faktor eksternal berupa munculnya gerakan oposisi dari kelompok Syiah dan Bani Abbasiyah mempercepat proses keruntuhan dinasti. Bani Abbasiyah berhasil memanfaatkan ketidakpuasan berbagai kelompok masyarakat untuk membangun kekuatan politik yang akhirnya menggulingkan Dinasti Umayyah pada tahun 750 M.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa luasnya wilayah kekuasaan tidak selalu menjamin keberlangsungan sebuah pemerintahan apabila tidak diimbangi dengan sistem politik yang inklusif dan kebijakan sosial yang adil. Konflik internal yang berlangsung terus-menerus melemahkan legitimasi pemerintah sehingga memudahkan munculnya kekuatan politik baru.

Hasil penelitian ini memperkuat pandangan Kennedy (2016) bahwa keruntuhan Dinasti Umayyah lebih banyak disebabkan oleh persoalan tata kelola pemerintahan dan konflik sosial dibandingkan oleh kekuatan militer musuh. Dengan demikian, stabilitas politik dalam sebuah negara sangat bergantung pada kemampuan pemerintah membangun keadilan sosial, pemerataan hak, serta legitimasi kekuasaan di tengah masyarakat yang majemuk.

Implikasi Temuan Penelitian

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan memiliki peran penting dalam transformasi sistem pemerintahan Islam



melalui pembentukan Dinasti Bani Umayyah. Reformasi administrasi yang dilakukannya berhasil menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan mampu mengelola wilayah kekuasaan yang sangat luas. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan politik dan ekspansi wilayah tidak mampu menjamin keberlangsungan pemerintahan apabila tidak disertai dengan kebijakan yang menjunjung prinsip keadilan, kesetaraan, dan integrasi sosial.

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian sejarah politik Islam dengan menunjukkan bahwa perkembangan suatu peradaban tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan militer atau luas wilayah kekuasaan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola pemerintahan, legitimasi politik, serta kemampuan pemerintah dalam mengelola keberagaman masyarakat. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan sumber kepustakaan sehingga belum melakukan kajian komparatif terhadap manuskrip sejarah primer secara lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian melalui analisis terhadap sumber-sumber sejarah klasik maupun pendekatan historiografi kontemporer agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai Dinasti Bani Umayyah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa berdirinya Dinasti Bani Umayyah merupakan salah satu fase penting dalam sejarah politik Islam yang menandai transformasi sistem pemerintahan dari model kepemimpinan berdasarkan musyawarah (*syura*) pada masa Khulafaur Rasyidin menjadi sistem monarki turun-temurun. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh dinamika politik pasca terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, konflik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, serta upaya menciptakan stabilitas politik melalui peristiwa '*Am al-Jama'ah*'. Dengan demikian, Muawiyah bin Abi Sufyan tidak hanya berperan sebagai pendiri



Dinasti Bani Umayyah, tetapi juga sebagai tokoh yang membawa perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan Islam.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Dinasti Bani Umayyah berhasil meletakkan dasar pemerintahan yang lebih terorganisasi melalui reformasi administrasi, pembentukan lembaga *diwan*, pengembangan sistem komunikasi (*barid*), penguatan birokrasi, serta pembentukan kekuatan militer yang lebih profesional. Reformasi tersebut mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan mendukung perluasan wilayah kekuasaan Islam hingga mencakup Afrika Utara, Andalusia, Asia Tengah, dan sebagian wilayah India. Selain itu, Dinasti Umayyah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan politik, ekonomi, budaya, dan arsitektur Islam melalui arabisasi administrasi, pencetakan mata uang Islam, pengembangan perdagangan internasional, serta pembangunan berbagai bangunan monumental yang menjadi warisan penting peradaban Islam.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan Dinasti Bani Umayyah tidak mampu mempertahankan keberlangsungan pemerintahannya karena dihadapkan pada berbagai persoalan internal dan eksternal. Konflik politik dalam keluarga penguasa, persaingan antarsuku Arab, kebijakan yang kurang mengakomodasi kaum *mawali*, serta munculnya gerakan oposisi dari kelompok Syiah dan Bani Abbasiyah menjadi faktor utama yang melemahkan legitimasi kekuasaan hingga akhirnya Dinasti Umayyah runtuh pada tahun 750 M. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan politik dan luas wilayah kekuasaan, tetapi juga oleh kemampuan menciptakan keadilan sosial, pemerataan hak, serta tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar penelitian selanjutnya tidak hanya berfokus pada aspek politik Dinasti Bani Umayyah, tetapi juga mengkaji kontribusinya terhadap perkembangan ilmu



pengetahuan, hukum, pendidikan, ekonomi, dan peradaban Islam dengan menggunakan sumber-sumber sejarah primer yang lebih beragam. Penelitian komparatif antara Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah juga perlu dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai transformasi sistem pemerintahan dan perkembangan peradaban Islam dari masa ke masa.

DAFTAR PUSTAKA

- Hitti, P. K. (2006). *History of the Arabs* (10th ed.). New York, NY: Palgrave Macmillan.
- Hodgson, M. G. S. (1974). *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization* (Vol. 1). Chicago, IL: The University of Chicago Press.
- Kennedy, H. (2016). *The Prophet and the Age of the Caliphates: The Islamic Near East from the Sixth to the Eleventh Century* (3rd ed.). London, England: Routledge.
- Lapidus, I. M. (2014). *A History of Islamic Societies* (3rd ed.). Cambridge, England: Cambridge University Press.